

**TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM MELALUI KERJA SAMA
PEMERINTAH DAN BADAN USAHA
(Studi Kasus Proyek KPBU SPAM Semarang Barat)**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota

Oleh:
FENITA ENGGRAINI
20140119410016



**FAKULTAS TEKNIK
MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2021**

**TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM MELALUI KERJA SAMA
PEMERINTAH DAN BADAN USAHA
(Studi Kasus Proyek KPBU SPAM Semarang Barat)**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Oleh :

Fenita Enggraini
20140119410016

Diajukan pada Sidang Akhir
Tanggal 27 Mei 2021

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar
Magister Perencanaan Wilayah dan Kota

Semarang, 1 Juni 2021

Tim Penguji:

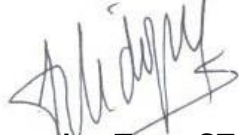
Dr.-Ing. Wiwandari Handayani, ST, MT, MPS. - Pembimbing :

Rukuh Setiadi, ST, MEM. Ph.D - Penguji 1:

Dr. Ir. Artiningsih, MSi - Penguji 2:



Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro



Wido Prananing Tyas, ST, MDP, Ph

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. Apabila dalam Tesis saya ternyata ditemui duplikasi, jiplakan (plagiat) dari Tesis orang lain/ institusi lain maka saya bersedia melepaskan gelar Magister Perencanaan Wilayah dan Kota dengan penuh rasa tanggung jawab.

Semarang, 27 Mei 2021



FENITA ENGRAINI
NIM. 20140119410016

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.

-Mahatma Gandhi

Kupersembahkan

Untuk suamiku dan anak-anakku, Khayla dan Salma...

Terima kasih atas dukungan, pengertian, kesabaran, dan doa yang luar biasa.

Untuk Bapak dan Ibu tercinta..

Terima kasih atas semangat dan doa yang tak kunjung putus.

Untuk diriku... Terima kasih sudah berjuang menyelesaikan.

ABSTRAK

Percepatan penyediaan infrastruktur air minum diperlukan dalam rangka memberikan akses air minum yang layak dan merata kepada masyarakat. Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) merupakan upaya pemerintah mengatasi keterbatasan pemenuhan infrastruktur air minum melalui keterlibatan swasta untuk tujuan *sustainability*. Salah satu tantangan dalam pengelolaan air adalah karakteristik hidrologi tidak bisa dipaksakan mengikuti batasan administratif pemerintahan. Mempertimbangkan hal tersebut, dibutuhkan tata kelola air yang terintegrasi dan adaptif yang mengedepankan kolaborasi dan pembelajaran terus-menerus (*adaptive water governance*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi implementasi *adaptive water governance* pada proyek KPBU SPAM Semarang Barat. KPBU SPAM Semarang Barat merupakan solusi atas permasalahan rendahnya layanan penyediaan air serta penurunan muka tanah di Kota Semarang. Terdapat tiga sasaran penelitian yaitu mengidentifikasi *stakeholder* dan memetakan pola interaksinya, menganalisis kategori tata kelola multilevel, serta melakukan penilaian pemenuhan karakteristik *adaptive water governance*. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Teknik *Social Network Analysis* (SNA) digunakan dalam analisis sasaran pertama yaitu mengidentifikasi *stakeholder* dan memetakan pola interaksinya. Analisis *Delphi* digunakan untuk analisis sasaran kedua dan ketiga yaitu penentuan kategori tata kelola dan penilaian pemenuhan karakteristik tata kelola air adaptif yang meliputi variabel interaksi multilevel dengan sub variabel koordinasi dan kerjasama serta distribusi kapasitas dan kekuasaan, variabel regulasi yang responsif, integrasi pengetahuan serta diversifikasi pembiayaan.

Data interaksi *stakeholder* untuk SNA diperoleh melalui wawancara dengan informan yang terlibat dalam tahap perencanaan, penyiapan, dan transaksi. Interaksi dibatasi pada keterkaitan kolaboratif, aliran informasi/pengetahuan, dan dukungan pembiayaan. Hasil olah data *software* Gephi 0.9.2 diketahui terdapat 39 *stakeholder* dengan 124 interaksi. Terdapat tiga *stakeholder* dengan nilai sentralitas tertinggi yaitu PJKP (Dirut PDAM) dengan nilai *degree of centrality* dan *eigenvector centrality* tertinggi, Bappeda Kota Semarang dengan nilai *betweenness centrality* tertinggi dan Walikota Semarang dengan nilai *closeness centrality* tertinggi. Pengumpulan data *Delphi Analysis* dilakukan melalui pengisian angket yang terkait dengan pemenuhan variabel *adaptive water governance* kepada panelis/responden yang mewakili kelompok *stakeholder* berdasarkan kelas interaksi. Berdasarkan variabel interaksi multilevel diperoleh kategori tata kelola *polycentric* yang dicirikan dengan desentralisasi kekuasaan dan koordinasi yang efektif. Sedangkan dari penilaian seluruh variabel diperoleh hasil bahwa KPBU SPAM Semarang Barat telah dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola air adaptif. Dengan indeks variabel interaksi multilevel 0.88, variabel regulasi yang responsif 0.88, variabel integrasi pengetahuan 0.78, dan variabel diversifikasi pembiayaan 0.93.

Penerapan tata kelola adaptif dalam praktik PPP merupakan upaya tepat dalam perbaikan penyediaan layanan air minum. Beberapa temuan aspek tata kelola yang mendukung keberhasilan proyek antara lain regulasi yang responsif yang mendukung asas desentralisasi, keberadaan lembaga dengan fungsi koordinator, serta kapasitas PJKP dalam membangun jejaring yang dinamis. Sedangkan temuan aspek tata kelola yang masih perlu dilakukan perbaikan antara lain belum optimalnya fungsi PPP Unit dan kemudahan akses terhadap informasi dan laporan perkembangan proyek.

Kata Kunci: KPBU, tata kelola, *adaptive water governance*, *stakeholder*

ABSTRACT

Accelerating drinking water infrastructure is needed in order to ensure access for sufficient and clean water to the community. Public-Private-Partnership (PPP) scheme is the government's effort to overcome capacity constraints to fulfill the infrastructure by involving private sector for sustainability. In water governance, hydrological characteristic can not be forced to follow administrative boundaries therefore integrated and adaptive governance is needed which promotes collaboration and continuous learning (adaptive water governance).

The aim of this study is to elaborate adaptive water governance concept in PPP SPAM Semarang Barat. PPP SPAM Semarang Barat is a pilot project in solving the problem of low water supply services and land subsidence in Semarang City. There are three research objectives, namely identifying stakeholders and mapping their interaction patterns, analyzing multilevel governance categories, and assessing the fulfillment of adaptive water governance characteristics. This research is using a qualitative approach. Social Network Analysis (SNA) technique is used for analyzing first objective, namely identifying stakeholders and mapping their interaction. Delphi Analysis technique is used for analyzing the second and third objectives, namely determining the category of governance and assessing the fulfillment of adaptive water governance characteristics which include multilevel interaction variables with sub-variables of coordination and collaboration as well as capacity distribution and power, responsive regulatory variable, knowledge integration variable and financing diversification variable.

Data for SNA analysis was obtained through interviews with informants who were involved in the planning, preparation, and transaction stages of PPP. Interaction is limited to collaborative linkages, information/knowledge flow, and financial support. The results of data processing used of Gephi 0.9.2 software, it is known that there are 39 stakeholders with 124 interactions. There are three stakeholders with the highest centrality value, namely PJPK (Director of PDAM) with the highest degree of centrality and eigenvector centrality, Development Planning Agency at Sub-National Level of Semarang city (Bappeda) with the highest betweenness centrality value and Mayor of Semarang city (Walikota) with the highest closeness centrality value. Data for Delphi Analysis is carried out through filling out a questionnaire related with adaptive water governance variables to panelist/respondent who represent stakeholder groups based on interaction class. From the multilevel interaction variable, it is obtained a polycentric governance category characterized by decentralization of power and effective coordination. Meanwhile, from the evaluation of all adaptive water governance variables, it is found that PPP SPAM of West Semarang has been implemented by applying adaptive water governance principles. The multilevel variable index is 0.88, the responsive regulatory variable 0.88, the knowledge integration variable 0.78, and the financing diversification variable 0.93.

Implementation of adaptive water governance concept in PPP SPAM Semarang Barat is an appropriate effort to improve the provision of drinking water. Some findings related to governance aspects that support the success of the projects are regulatory framework which has responsiveness and as an embodiment of decentralization, institution which support the coordination function, and the capacity of PJPK in developing dynamic network. Meanwhile the governance aspects that needs to be improved are the performance of PPP Unit and acessability of information and report related to PPP Project.

Keywords : *PPP, governance, adaptive water governance, stakeholder*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang memberi kemampuan kepada penulis menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat yang memperoleh gelar S2 Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro. Tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada:

1. Kepala Pusbindiklatren Bappenas yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan pada Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro.
2. Ibu Dr.-Ing. Wiwandari Handayani, ST, MT, MPS selaku Dosen Pembimbing, atas arahan, masukan dan semangat, serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam penyusunan Tesis ini.
3. Bapak Rukuh Setiadi, ST, MEM, PhD dan Ibu Dr. Ir. Artiningsih, Msi selaku Dosen Penguji pada sidang tesis yang telah memberikan koreksi, masukan, dan arahan dalam penyempurnaan Tesis ini.
4. Ibu Wido Prananing Tyas, ST, MDP, PhD selaku Ketua Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta seluruh Staf pada Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro.
6. Suami, anak-anak, orang tua, serta seluruh keluarga penulis atas dukungan doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
7. Keluarga besar LKPP khususnya Bapak Ir. Fadli Arif,. DESS dan Pimpinan serta staf pada Biro Hukum Organisasi dan Sumber Daya Manusia atas izin dan dukungan selama studi.
8. Seluruh responden dan informan yang meluangkan waktu berbagi informasi dan pengalaman, yang telah membantu penulis dalam penyusunan Tesis.
9. Seluruh rekan-rekan MPWK Undip angkatan 2019 khususnya kelas PPW 2019 dan rekan Karyasiswa Program Pusbindiklatren Bappenas atas semangat dan dukungan kepada penulis.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri bagi saran-saran perbaikan agar penulisan tesis ini dapat menjadi lebih baik dan terutama dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 27 Mei 2021

Fenita Enggraini

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNTARAAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian.....	4
1.4. Ruang Lingkup Penelitian	4
1.4.1. Kerangka Lingkup Penelitian	5
1.4.2. Ruang Lingkup Wilayah.....	7
1.4.3. Ruang Lingkup Substansi.....	8
1.5. Manfaat Penelitian.....	8
1.5.1. Manfaat Teoritis	8
1.5.2. Manfaat Praktis.....	8
1.6. Kerangka Pikir Penelitian.....	9
1.7. Metode Penelitian	10
1.7.1. Kebutuhan Data	10
1.7.2. Teknik Pengumpulan Data	11
1.8. Analisis Data	18
1.8.1. Analisis Interaksi Stakeholder.....	18
1.8.2. Analisis Kategori Tata Kelola	21
1.8.3. Analisis Pemenuhan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Air Adaptif ...	22
1.8.4. Kerangka Analisis	26
1.9. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II KAJIAN PUSTAKA	29
2.1 Penyediaan Infrastruktur	29
2.2 Tata kelola	30
2.2.1. Tata Kelola Berdasarkan Bentuk Interaksi.....	30
2.2.2. Tata Kelola Berdasarkan Skala Interaksi	31
2.3 Tata Kelola Dalam Sektor Penyediaan Air	32
2.3.1. Tantangan Tata Kelola dalam Sektor Penyediaan Air	32
2.3.2. Tata Kelola Air Adaptif (<i>Adaptive Water Governance</i>).....	33
2.4 Public Private Partnership (PPP).....	41
2.5 Sintesis Kajian Pustaka.....	44

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH	51
3.1 Sistem Penyediaan Air Minum.....	51
3.2 Penyelenggaraan SPAM Kota Semarang	52
3.3 Rencana Pengembangan SPAM Semarang Barat	55
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI TATA KELOLA AIR ADAPTIF PADA KPBU SPAM SEMARANG BARAT	63
4.1. Analisis Interaksi <i>Stakeholder</i> melalui <i>Social Network Analysis</i>	63
4.1.1. Identifikasi <i>Stakeholder</i> dan Interaksi antar <i>Stakeholder</i>	63
4.1.2. Analisis Diagram Jejaring <i>Stakeholder</i>	65
4.1.3. Decision Making Authority	71
4.2. Analisis Kategori Tata Kelola Multilevel.....	76
4.3. Analisis Pemenuhan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Air Adaptif	82
4.3.1. Penilaian Variabel Tata Kelola Air Adaptif	82
4.3.2. Tingkat Pemenuhan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Air Adaptif pada proyek KPBU SPAM Semarang Barat.....	91
4.4. Sintesis Penelitian.....	96
4.4.1. Penerapan Tata Kelola Air Adaptif dalam KPBU Sektor Air Minum	96
4.4.2. Hasil Pembelajaran (Lesson Learned).....	98
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	101
5.1. Kesimpulan.....	101
5.2. Rekomendasi	102
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN.....	107

DAFTAR TABEL

TABEL I.1	Kebutuhan Data Penelitian	12
TABEL I.2	Tugas dan Fungsi Instansi yang Terkait dengan KPBU SPAM Semarang Barat.....	16
TABEL I.3	Contoh Perhitungan Skor per Panelis/Responden	25
TABEL I.4	Contoh Perhitungan Skor Kumulatif	25
TABEL II.1	Karakteristik Adaptive Water Governance.....	37
TABEL II.2	Parameter Keberhasilan PPP	45
TABEL II.3	Sintesis Kajian Pustaka.....	47
TABEL III.1	Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kota Semarang	57
TABEL III.2	Proyeksi Kebutuhan Air Wilayah Pelayanan Cabang Barat.....	58
TABEL III.3	Komponen Biaya Investasi SPAM Semarang Barat	60
TABEL IV.1	Stakeholder Dalam KPBU SPAM Semarang Barat	63
TABEL IV.2	Data Sentralitas Interaksi Antar Stakeholder KPBU SPAM Semarang Barat.....	66
TABEL IV.3	Identifikasi Panelis/Responden Dalam Pengisian Angket Delphi	73
TABEL IV.4	Skor Variabel Interaksi Multilevel	83
TABEL IV.5	Skor Variabel Regulasi yang Responsif	83
TABEL IV.6	Skor Variabel Integrasi Pengetahuan.....	85
TABEL IV.7	Skor Variabel Diversifikasi Pembiayaan.....	85
TABEL IV.8	Perhitungan Skor Variabel Interaksi Multilevel Sub Variabel Koordinasi dan Kerjasama.....	86
TABEL IV.9	Perhitungan Skor Variabel Interaksi Multilevel Sub Variabel Distribusi Kapasitas dan Kekuasaan.....	87
TABEL IV.10	Perhitungan Skor Variabel Regulasi yang Responsif	88
TABEL IV.11	Perhitungan Skor Variabel Integrasi Pengetahuan	89
TABEL IV.12	Perhitungan Skor Variabel Diversifikasi Pembiayaan	90

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	Kerangka Lingkup Penelitian	6
GAMBAR 1.2	Area Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum Cabang Barat..	7
GAMBAR 1.3	Kerangka Pikir Penelitian	9
GAMBAR 1.4	Matriks Interaksi Multilevel	21
GAMBAR 1.5	Kerangka Analisis Penelitian.....	26
GAMBAR 2.1	PPP Cycle	42
GAMBAR 3.1	Pihak yang Terlibat Dalam Penyelenggaraan SPAM.....	51
GAMBAR 3.2	Wilayah Pelayanan PDAM Tirta Moedal Semarang.....	55
GAMBAR 3.3	Dukungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Semarang, dan PDAM Dalam KPBU SPAM Semarang Barat.....	61
GAMBAR 3.4	Hubungan Kelembagaan Proyek KPBU SPAM Semarang Barat.....	61
GAMBAR 3.5	Tahapan Proyek KPBU SPAM Semarang Barat	62
GAMBAR 4.1	Diagram Jejaring Stakeholder KPBU SPAM Semarang Barat	65
GAMBAR 4.2	Interaksi Vertikal dan Horizontal	72
GAMBAR 4.3	SNA Tahap Perencanaan	73
GAMBAR 4.4	SNA Tahap Penyiapan.....	74
GAMBAR 4.5	SNA Tahap Transaksi.....	75
GAMBAR 4.6	Matriks Interaksi Multilevel KPBU SPAM Semarang Barat ...	78
GAMBAR 4.7	Kerangka Regulasi KPBU SPAM Semarang Barat.....	80
GAMBAR 4.8	Tingkat Pemenuhan Prinsip Tata Kelola Air Adaptif KPBU SPAM Semarang Barat.....	91
GAMBAR 4.9	ImplementasiTata Kelola Air Adaptif dalam PPP Untuk Mendukung Perbaikan Layanan Penyediaan Air Minum.....	97
GAMBAR 4.10	Sintesis Temuan Penelitian.....	100

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I Panduan Wawancara dan Angket Delphi	107
I-A Daftar Pertanyaan Wawancara.....	107
I-B Angket Delphi	112
I-C Sintesis dan Kodifikasi Hasil Wawancara	115
LAMPIRAN II Data Interaksi Stakeholder	124
II-A Net-Map Data	124
II-B Pengelompokkan Stakeholder Berdasarkan Kelas Interval	131
LAMPIRAN III Regulasi Penyelenggaraan SPAM di Indonesia.....	134
LAMPIRAN IV Tabel Konvergensi	136
IV-A Tabel Konvergensi Variabel Interaksi Multilevel.....	136
IV-B Tabel Konvergensi Variabel Regulasi yang Responsif.....	137
IV-C Tabel Konvergensi Variabel Integrasi Pengetahuan	138
IV-D Tabel Konvergensi Diversifikasi Pembiayaan.....	139
LAMPIRAN V Triangulasi Data	140
V-A Triangulasi Data Kategori Koordinasi dan Kerjasama.....	140
V-B Triangulasi Data Kategori Distribusi Kapasitas dan Kekuasaan	141
V-C Penarikan Opini Panelis/Responden terhadap Pernyataan Variabel Integrasi Pengetahuan yang Tidak Mencapai Konsensus	142
LAMPIRAN VI Sasaran, Variabel, Indikator, Definisi Operasional, Kriteria Penilaian, dan Kebutuhan Data Penelitian	143

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Kebutuhan Data Penelitian	12
Tabel I.2	Tugas dan Fungsi Instansi yang Terkait dengan KPBU SPAM Semarang Barat.....	16
Tabel I.3	Contoh Perhitungan Skor per Panelis/Responden	24
Tabel I.4	Contoh Perhitungan Skor Kumulatif	25
Tabel II.1	Karakteristik Adaptive Water Governance.....	36
Tabel II.2	Parameter Keberhasilan PPP	43
Tabel II.3	Sintesis Kajian Pustaka.....	45
Tabel III.1	Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kota Semarang	56
Tabel III.2	Proyeksi Kebutuhan Air Wilayah Pelayanan Cabang Barat	57
Tabel III.3	Komponen Biaya Investasi SPAM Semarang Barat	59
Tabel IV.1	Stakeholder Dalam KPBU SPAM Semarang Barat	62
Tabel IV.2	Data Sentralitas Interaksi Antar Stakeholder KPBU SPAM Semarang Barat.....	65
Tabel IV.3	Identifikasi Panelis/Responden Dalam Pengisian Angket Delphi..	75
Tabel IV.4	Skor Variabel Interaksi Multilevel	82
Tabel IV.5	Skor Variabel Regulasi yang Responsif	82
Tabel IV.6	Skor Variabel Integrasi Pengetahuan	84
Tabel IV.7	Skor Variabel Diversifikasi Pembiayaan.....	84
Tabel IV.8	Perhitungan Skor Variabel Interaksi Multilevel Sub Variabel Koordinasi dan Kerjasama.....	85
Tabel IV.9	Perhitungan Skor Variabel Interaksi Multilevel Sub Variabel Distribusi Kapasitas dan Kekuasaan.....	86
Tabel IV.10	Perhitungan Skor Variabel Regulasi yang Responsif.....	87
Tabel IV.11	Perhitungan Skor Variabel Integrasi Pengetahuan	88
Tabel IV.12	Perhitungan Skor Variabel Diversifikasi Pembiayaan	89

DAFTAR ISTILAH

Adaptif

Kemampuan suatu kebijakan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan saat ini.

Adaptive Water Governance

Konsep tata kelola air yang menerapkan pendekatan kolaboratif dan multilevel, serta menekankan manajemen/pengaturan yang fleksibel melalui pembelajaran terus menerus, yang selanjutnya dalam penelitian ini diterjemahkan sebagai Tata Kelola Air Adaptif.

Angket

Seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis yang digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data.

Betweenness Centrality

Nilai yang dapat menunjukkan *stakeholder* yang berperan sebagai penghubung (jembatan) antara dua kelompok *stakeholder* dalam jaringan tata kelola.

Closeness Centrality

Menggambarkan nilai kedekatan satu *stakeholder* dengan *stakeholder* lainnya dalam jaringan tata kelola. Semakin dekat, menunjukkan bahwa semakin mudah *stakeholder* tersebut terhubung dengan *stakeholder* lainnya.

Degree of Centrality

Adalah nilai derajat sentralitas interaksi atau banyaknya interaksi yang dilakukan *stakeholder* dalam suatu jaringan tata kelola.

Desentralisasi

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom (untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan) dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Eigenvector Centrality

Nilai yang digunakan untuk menunjukkan *stakeholder* yang memiliki keterkaitan erat dengan *stakeholder* lainnya yang bersifat sentral.

Final Business Case (FBC)

Dokumen FBC atau Kajian Akhir Prastudi Kelayakan terdiri dari penyempurnaan data dengan kondisi terkini dan pemutakhiran atas kelayakan dan kesiapan KPBU yang sebelumnya telah tercakup dalam kajian awal Prastudi Kelayakan (OBC), termasuk penyelesaian hal-hal yang perlu ditindaklanjuti.

Integrasi

Upaya untuk saling berkoordinasi dan berkolaborasi dalam rangka meningkatkan sinergi dan mengurangi *trade-off* kepentingan.

Konsensus

Pencapaian kesepakatan atas suatu pendapat dari kelompok panelis/responden yang dianggap ahli.

Outline Business Case (OBC)

Dokumen OBC atau Kajian Awal Prastudi Kelayakan adalah kajian yang dilakukan untuk menilai kelayakan KPBU dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya aspek hukum, teknis, ekonomi, keuangan, pengelolaan risiko, lingkungan, dan sosial.

Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan. PJPK dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum adalah direksi BUMN atau direksi BUMD sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur SPAM berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Polisentris/Multilevel

Pendekatan tata kelola dimana skala interaksi tidak hanya pada hubungan antar aktor pemerintahan saja namun juga melibatkan pihak lainnya yaitu aktor non-pemerintah, swasta, organisasi internasional, serta masyarakat.

Public Private Partnership (PPP)

Kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta dalam rangka penyediaan infrastruktur maupun layanan publik berdasarkan kontrak jangka panjang yang dilakukan untuk tujuan efisiensi dan penyediaan layanan yang berkualitas. Di Indonesia, istilah PPP disebut sebagai Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden No 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

PPP Unit

Lembaga/organisasi yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan fungsi terkait PPP yaitu perumusan kebijakan, pemberian dukungan teknis dan peningkatan kapasitas, promosi dan investasi, advokasi, serta memastikan proyek PPP berhasil diimplementasikan.

Simpul KPBU

Unit kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang bertugas menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pembangunan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang diselenggarakan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat dan memenuhi hak rakyat atas Air Minum.

Stakeholder

Pemangku kepentingan, yaitu baik perorangan, kelompok maupun lembaga yang secara aktif terlibat dalam kegiatan, mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung, atau yang mempengaruhi atau dipengaruhi secara positif atau negatif atas pelaksanaan suatu program atau kegiatan.

Viability Gap Funding (VGF)

Dukungan kelayakan atas sebagian biaya konstruksi yang diberikan pemerintah dalam bentuk kontribusi sebagian biaya konstruksi yang diberikan secara tunai pada proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang sudah memiliki kelayakan ekonomi namun belum memiliki kelayakan finansial.